

# RESOLUSI KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN DI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI DESA SAJANG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Andi Chairil Ichsan<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mataram, Indonesia

\*e-mail: andi.foresta@unram.ac.id

## Abstrak

Dalam sistem pengelolaan taman nasional gunung rinjani, tidak lepas dari adanya interkasi masyarakat dengan kawasan yang berimplikasi pada munculnya permasalahan pokok seperti perambahan, pencurian kayu, perburuan liar, dan pengembalaan ternak dalam kawasan yang sampai saat ini masih sering ditemui. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk merumuskan resolusi konflik penggunaan lahan yang terjadi pada wilayah Desa sajang Taman nasional gunung Rinjani. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, Studi Dokumen dan FGD. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi konsep analisis gaya bersengketa untuk memetakan sikap para aktor konflik dalam menghadapi sengketa. Sikap atau gaya tersebut berupa gaya menghindar, gaya akomodasi, gaya kompromi, gaya kompetisi dan gaya kolaborasi. Hasil penelitian dapat mengklasifikasikan aktor yang terlibat kedalam tiga kategori resolusi yaitu kompromi, negosiasi dan kolaborasi. Hasil analisis juga mendeskripsikan bahwa masih terjadi perbedaan pendapat terkait dengan bentuk bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan pada wilayah tersebut. Hal ini berimplikasi pada tingginya potensi kesalahpahaman antar-pihak, sehingga dibutuhkan sebuah kejelasan mekanisme terkait teknis penyelesaian konflik seperti membangun kesepahaman bersama, serta penguatan proses kolaborasi maupun fasilitasi ditingkat masyarakat.

**Kata kunci:** Konflik; Taman Nasional; Resolusi

## Abstract

The Gunung Rinjani National Park management system cannot be separated from the community's interaction with the area, which has implications for the emergence of main problems such as encroachment, timber theft, illegal hunting, and livestock grazing in areas that are still often encountered. This research aims explicitly to formulate the resolution of land-use conflicts in Sajang Village, Mount Rinjani National Park. This research uses a case study approach with several data collection techniques such as observation, interviews, document studies, and focus group discussions. The data analysis used in this study adopts the disputing style analysis to map the attitudes of conflict actors in dealing with disputes. These attitudes or styles include avoiding, accommodating, compromising, competition, and collaboration. The study's results can classify the actors involved into three resolution categories: compromise, negotiation, and collaboration. The results also describe that there are still differences of opinion regarding the forms of utilization that are allowed in the area. It has implications for the high potential for misunderstandings between the parties, so a precise mechanism is needed regarding technical conflict resolution, such as building mutual understanding, as well as strengthening collaboration and facilitation processes at the community level.

**Keywords:** Conflict; National Park; Resolution

---

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



## PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk, eksploitasi yang berlebihan dan adanya ketidakadilan dalam akses terhadap sumberdaya alam telah menjadi penyebab terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya hutan di Indonesia. Forest Watch Indonesia menyebutkan bahwa deforestasi hutan pada periode 2009 – 2013 mencapai rata-rata 1,13 juta ha per tahun, dimana tutupan hutan tersisa tahun 2013 seluas 82 juta ha (Forest Watch Indonesia, 2014). Disisi lain, (Wiyono et al, 2006) menyatakan bahwa sekitar 48,8 juta penduduk Indonesia bertempat tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan sekitar 10,2 juta jiwa diantaranya tergolong dalam klasifikasi miskin, dimana pada umumnya mata pencaharian masyarakat tersebut adalah memanfaatkan produk-produk hutan, baik kayu maupun bukan kayu, antara lain rotan, damar, gaharu dan pemanfaatan lebah madu oleh masyarakat sekitar hutan.

Proses transformasi penguasaan sumberdaya oleh pihak masyarakat lokal menjadi sumberdaya milik negara, di berbagai negara telah mengarah pada: (1) penghilangan kelembagaan kearifan lokal; (2) lemahnya kapasitas monitoring dan kontrol kelembagaan negara terutama pada sumberdaya-sumberdaya yang berskala luas, kompleks yang diklaim dan dikuasai oleh negara, dan (3) pemanfaatan sumberdaya yang terjebak pada kondisi *de facto open access* dan kecenderungan para pihak menjadi berlomba untuk memanfaatkan sumberdaya sebesar-besarnya untuk kepentingan masing-masing (Ernan Rustiadi, 2005). Hal tersebut berimplikasi pada tingginya konflik dan lemahnya kapasitas manajemen di tingkat tapak. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) pada tahun 2012 mencatat, telah terjadi 278 konflik sumber daya alam dan agraria, yang berlangsung di 98 kota/kabupaten di 23 provinsi dengan luas area konflik mencapai 2.416.035 hektar.

Situasi yang sama juga terjadi di Provinsi NTB khususnya di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), dimana permasalahan perambahan, konflik, pencurian kayu, perburuan liar, dan pengembalaan ternak dalam kawasan masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pengelola TNGR (BTNGR, 2014). Berdasarkan informasi dari BAPPENAS, di tahun 2015 saja lahan TNGR yang telah dirambah masyarakat mencapai 300 Ha (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., 2015).

Kondisi tersebut jelas tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, dibutuhkan upaya yang komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi kawasan hutan khususnya kawasan konservasi sebagai penyangga bagi kehidupan masyarakat, sekaligus juga sebagai habitat alami komponen ekosistem yang ada di dalamnya. (Zuhud EAM, 2011) mengungkapkan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan konservasi perlu ditinjau kembali. Hal ini terbukti dari pengalaman : pendekatan “*pelarangan*” dan “*perlindungan*” yang selama ini digunakan dalam pengelolaan taman nasional serta kawasan konservasi lainnya cenderung berimplikasi pada terjadinya konflik-konflik sumberdaya yang tidak terelakkan terutama dengan masyarakat lokal. Desakan mengenai arah perubahan konsep pembangunan kawasan konservasi juga didorong oleh World Conservancy Strategy 1980, yang menyebutkan bahwa untuk menjamin tujuan konservasi dapat terwujud dan terintegrasi antara konservasi dan pembangunan, direkomendasikan bahwa setiap negara perlu meninjau dengan fokus pada kebutuhan prioritas dan penyelesaian hambatan utama, salah satunya dengan menjamin pemanfaatan berkelanjutan dari spesies dan ekosistem untuk mendukung penghidupan jutaan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan resolusi

konflik berdasarkan sikap dan gaya bersengketa yang menjadi pilihan masing masing aktor terkait penggunaan lahan pada kawasan TNGR.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai Desember 2018 yang berlokasi di Desa Sajang Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu pendekatan yang menguraikan dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai berbagai aspek baik itu individu, kelompok, program, atau suatu situasi sosial, dimana penelitian ini diupayakan untuk menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti, serta menggunakan berbagai instrumen sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Mulyana D, 2006; Ichsan et al., 2019). Data penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrumen pengumpulan data dalam bentuk wawancara terstruktur, observasi lapang, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), *Partisipatory Rural Appraisal* (Chambers, 1992; Sevilla CG et al, 1993; Raja, 2012; Chairil Ichsan et al., 2020) dan studi pustaka. Beberapa orang informan dipilih berdasarkan karakteristik yang dikembangkan oleh Spradley dalam (Bungin, 2003), dimana mereka merupakan keterwakilan dari Pemerintah Desa, Lembaga masyarakat Tokoh Masyarakat dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR). Sedangkan penentuan informan dipilih melalui metode *Snowball sampling* yang merepresentasikan aktor aktor yang terlibat dalam konflik di kawasan TNGR. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi konsep analisis gaya bersengketa (AGATA) yang dikembangkan oleh Pasya G, (2011), guna memetakan sikap para aktor konflik dalam

menghadapi sengketa. Sikap atau gaya tersebut berupa: 1) gaya menghindar (avoiding), 2) gaya akomodasi (accomodating), 3) gaya kompromi (compromising), 4) gaya kompetisi (competing), dan 5) gaya kolaborasi (collaborating).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil Fokus grup diskusi dan observasi pada wilayah desa sajang kabupaten Lombok timur, diperoleh informasi bahwa selama ini masyarakat memanfaatkan kawasan TNGR memenuhi berbagai kebutuhannya. Beberapa diantaranya yaitu; sebagai sumber air untuk kebutuhan keseharian, kemudian masyarakat juga sering menggunakan kawasan TNGR untuk melepas ternak, mencari ilalang untuk media tanam tanaman bawang, serta membangun rumah seperti terlihat pada Gambar 1.

Aktivitas-aktivitas ini sudah dilakukan masyarakat sebelum indonesia merdeka, berdasarkan latar belakang sejarahnya, masyarakat yang berada di wilayah desa sajang sudah sangat lama menetap di wilayah tersebut dan beraktifitas di dalam wilayah hutan.. hal ini juga sejalan dengan pendapat Gamin, (2017) dan Sahabu et al.,(2013) yang mengungkapkan bahwa pada prinsipnya masyarakat sekitar hutan sudah membangun sistem kehidupan dan berinteraksi dengan kawasan hutan jauh sebelum adanya penetapan kawasan oleh Negara, mereka menggunakan sistem budaya lokal secara turun temurun untuk membangun ruang hidup mereka baik dengan sesama manusia maupun dengan alam disekitarnya (Zulfikar & Nasdian, 2018).



Gambar 1. (A) Bagian Rumah yang masuk kedalam kawasan TNGR, (B) Aktivitas pembuatan kandang di dalam kawasan TNGR, (C) Rumah masuk dalam kawasan TNGR, (D) sampah didalam kawasan, (Sumber Gambar : Canopi Rimbawan Indonesia 2018)

Namun demikian, sejak di tetapkan sebagai wilayah TNGR pada tahun 1997 aktifitas-aktifitas tersebut di larang oleh pihak BTNGR sehingga masyarakat memanfaatkan kawasan TNGR secara sembunyi-sembunyi, disamping itu, perbedaan persepsi dan ketidak jelasan mekanisme pemanfaatan sumberdaya lahan dikawasan TNGR berimplikasi pada terjadinya konflik antara warga setempat dengan petugas kehutanan sehingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan pada kawasan tersebut.

Hasil analisis yang dilakukan terhadap situasi pengelolaan sumberdaya hutan dikawasan desa sajang kabupaten lombok timur, menunjukan bahwa masing masing pihak memiliki karakteristik tersendiri dalam merespon konflik yang terjadi. Merujuk pada konsep-konsep analisis gaya bersengketa yang dikembangkan Pasya dan Sirait (2011), gaya masing masing pihak digolongkan kedalam lima kategori. Pertama, gaya menghindari (*avoiding*) merupakan sikap yang ditunjukkan ketika salah satu pihak selalu menghindari diskusi tentang sengketa, berperilaku tidak jelas (*non-committal*) atau tak ingin membangun komitmen. Gaya ini sangat efektif pada

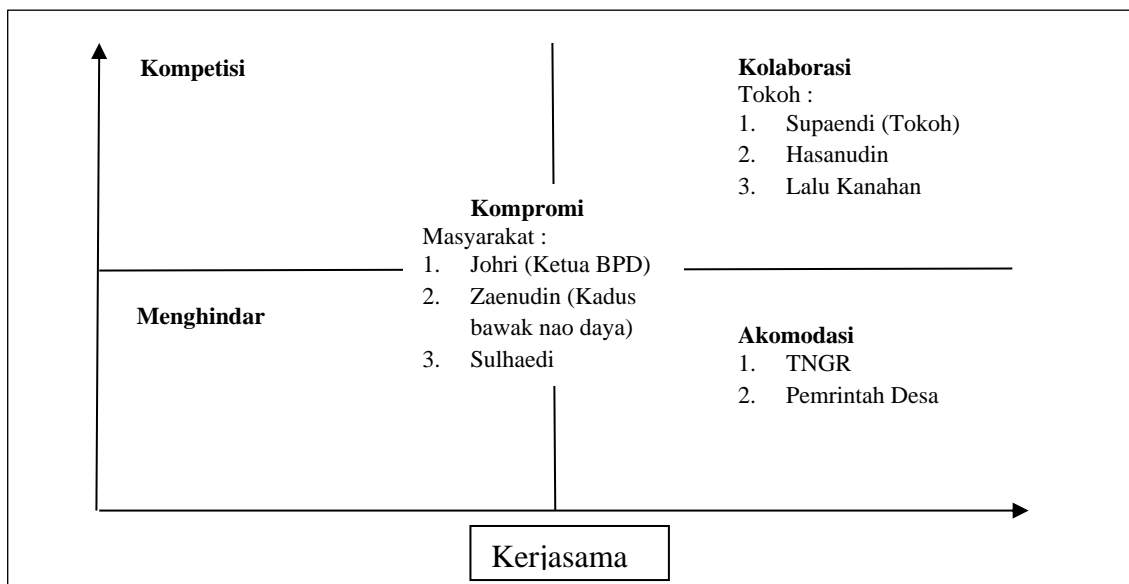
suatu situasi dimana terdapat bahaya fisik, atau situasi yang amat rumit yang tidak mungkin upaya penyelesaian dilakukan. Kedua, gaya akomodasi (*accomodating*), merupakan salah satu sikap dimana salah satu pihak lebih mendahulukan kepentingan pihak lain dan mengorbankan kepentingan kelompoknya. Gaya tersebut efektif pada situasi ketika suatu pihak menyadari bahwa memuaskan kepentingan diri/ kelompoknya dapat berdampak pada munculnya perselesaian dengan kelompok lain.

Ketiga, gaya kompromi (*compromising*), terjadi jika parapihak secara bersama memilih jalan tengah, hal ini efektif pada situasi ketika parapihak sulit untuk bekerjasama sementara pada saat yang bersamaan diperlukan jalan keluar dari keduabelahpihak. Keempat, gaya kompetisi (*competing*), merupakan sikap yang dicirikan dengan tindakan-tindakan menekan pihak lain, cenderung agresif serta berperilaku tidak kooperatif. sikap ini efektif ketika diperhadapkan pada satu keputusan singkat meskipun keputusan

harus menekan pihak lainnya. Kelima, gaya kolaborasi (*collaborating*). ditunjukkan dengan sikap saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak, terfokus dan komunikatif serta sama sama menguntungkan. hal ini efektif pada situasi dimana ada keseimbangan kekuasaan serta tersedia cukup waktu untuk saling mamahmi dan menentukan keputusan secara bersama.

Model penanganan konflik ini terbentuk dari kombinasi dua unsur yaitu (Thomas dan Kilmann dalam Wirawan, 2010) : kerjasama (*cooperativeness*), dan keasertifan (*assertiveness*). Kerjasama adalah upaya untuk memuaskan pihak lain jika menghadapi konflik. Keasertifan adalah upaya untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik.

Dari uraian tersebut, maka karaktersitik gaya bersengketa masing masing pihak di desa sajang digolongkan kedalam tiga kategori utama yaitu kolaborasi, kompromi dan akomodasi seperti yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil pemetaan gaya bersengketa masing-masing aktor di Desa Sajang

Gaya kompromi di tunjukan oleh masyarakat desa sajang dan kepala BPD Desa sajang, karena pada prinsipnya mereka mengakui adanya kawasan hutan disekitar wilayah mereka, dan berharap dapat di izinkan untuk mengelola kawasan tersebut. Selain itu mengenai konflik rumah masyarakat yang masuk kedalam kawasan Taman nasional, masyarakat berharap untuk tetap dapat tinggal di rumah yang telah mereka tempati dan tidak dilakukan pengurusan.

Gaya Kolaborasi di tunjukan oleh pihak menjadi tokoh masyarakat serta kepala dan sekretaris desa sajang. Karena ingin mencari solusi yang tepat dan terbaik dalam menangani konflik rumah masyarakat yang masuk kedalam kawasan taman nasional demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat serta pihak taman nasional.

Gaya akomodasi di tunjukan oleh pihak pemerintah desa dengan Taman nasional. Dimana pihak pemerintah desa mengakomodasi keinginan dan aspirasi dari masyarakat desa kemudian membantu melanjutkan aspirasi tersebut kepada pihak bersangkutan dalam hal ini adalah pihak Taman nasional. Disisi lain juga pihak taman nasional sudah melakukan upaya akomodasi dalam bentuk penataan status kawasan tersebut sebagai zona khusus yang bisa digunakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa gaya bersengketa masing masing pihak berada pada kompromi, kolaborasi dan akomodasi. Dengan demikian, berdasarkan pandangan Pasya dan Sirait (2011) yang menyatakan apabila gaya pihak dalam bersengketa

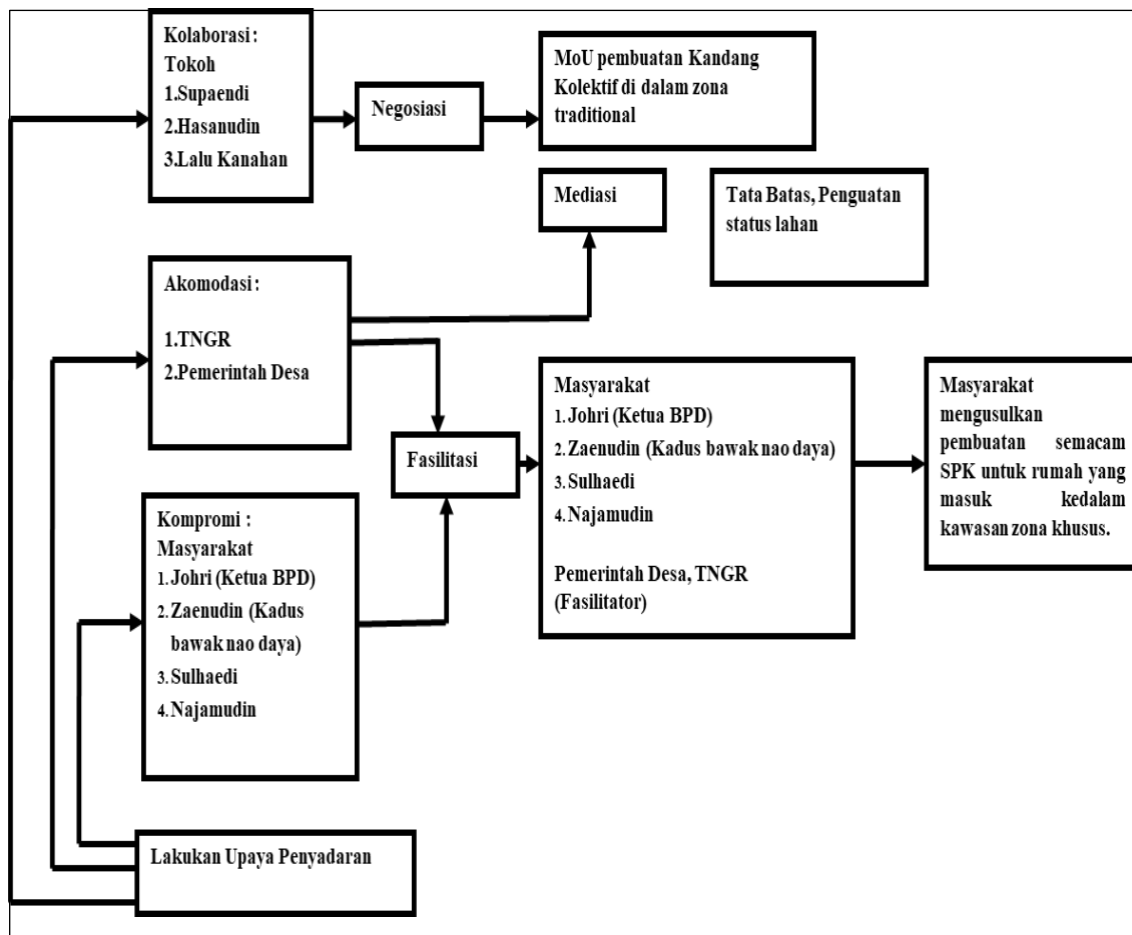
menunjukkan gaya-gaya kompromi, akomodasi dan kolaborasi, maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh pesengketa setidaknya cukup untuk memulai mediasi.

Mitchell, Bruce dan B. Setiawan, (2003) menyatakan bahwa mediasi merupakan manivestasi dari karakter negoasiasi ditambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan kesepakatan akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan perumus persoalan dengan tujuan untuk membantu pihak yang bersengketa agar sepakat. Beberapa skema yang dapat dilakukan dalam rangka proses mediasi konflik berdasarkan kerangka Analisis gaya bersengketa seperti terlihat pada Gambar 3.

Berdasarkan Gambar 3, terdapat dua strategi pendekatan yang dapat dilakukan untuk mereduksi potensi konflik yang terjadi. Dua pendekatan tersebut yaitu :

1. Memfasilitasi pihak bergaya kompromi dan akomodasi

Masyarakat desa (johri, zaenudin, sulhaedi dan najamudin) yang bergaya berkompromi dan pemerintah desa serta balai taman nasional gunung rinjani yang bergaya akomodasi dipandang telah memiliki cukup modal sosial yang cukup untuk memulai mediasi. Fasilitasi dilakukan dengan menggunakan data perubahan zonasi terbaru mengenai perumahan yang masuk kedalam kawasan (zona khusus). Dengan membuat sebuah surat perjanjian agar masyarakat mengetahui dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku didalam zona khusus taman nasional.



Gambar 3. Kerangka analisis gaya bersengketa masing masing aktor di Desa Sajang

## 2. Menemukan kesepakatan dengan pihak bergaya kolaborasi

Pihak Tokoh masyarakat desa sajang (supaendi, hasanudin, lalu kanahan) melalui desa telah melaksanakan negosiasi dengan pihak balai taman nasional gunung rinjani untuk melaksanakan pengelolaan atau pembuatan kandang kolektif didalam zona tradisional kawasan taman nasional gunung rinjani. Dalam negosiasi telah disepakati luas lahan yang digunakan adalah seluas 1 Ha. Situasi tersebut, membutuhkan proses komunikasi dan negosiasi yang memadai untuk membangun ruang kolaborasi yang lebih

baik. (Kadir W et al., 2013; Suporahardjo, 2005) mengungkapkan bahwa para aktor yang akan berkolaborasi sebaiknya mengevaluasi kemampuannya dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin dihadapinya. Salah satu kondisi yang menyebabkan tingkat keberhasilannya rendah, yaitu ketika salah satu pihak mempunyai power untuk melakukan aksi sepihak. Oleh karenanya proses penyenggaraan kolaborasi harus didasarkan pada prinsip co-ownership, co-operation, coresponsibility. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. *Prinsip Co-ownership*  
yaitu prinsip dimana Kawasan Konservasi yang menjadi objek sengketa pengelolaannya dilakukan bersama, pemanfaatan dan perlindungan dilaksanakan bersama berdasarkan pada nilai kearifan teknologi dan budaya lokal.
2. *Prinsip Co-operation*  
merupakan tatacara pembagian peran antar parapihak yang didasarkan pada kapasitas dan proporsinya masing-masing
3. *Prinsip Co-responsibility*  
yaitu model pengelolaan Kawasan Konservasi, dimana kegiatan perlindungan dan pembinaan kawasan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder.

Pengelolaan kolaboratif juga dapat berjalan efektif jika para parapihak membuka ruang dialog dan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program (Hakim et al., 2016; Herawati et al., 2010; Andi Charil et al., 2017) Kolaborasi juga bisa di dorong dengan menjamin bahwa tidak ada dominasi pada proses yang sedang dijalankan. Hal tersebut juga diungkapkan (Borrini Feyerabend G. 2000; Wollenberg et al., 2005) yang menyatakan bahwa proses kolaborasi harus mampu memastikan pembagian yang adil (*fair sharing*) dari parapihak terhadap distribusi hak dan tanggung jawab dalam arena tertentu

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Konflik yang terjadi pada wilayah Desa Sajang tidak bisa dipisahkan dari adanya interaksi masyarakat dengan sistem pengelolaan kawasan yang sedang dijalankan oleh Taman nasional gunung Rinjani. situasi tersebut memerlukan upaya konstruktif dari parapihak dalam mengurangi dampak negatif yang terjadi. Hasil analisis gaya bersengketa parapihak

yang berkonflik membagi para aktor kedalam tiga kategori resolusi yaitu kompromi, negosiasi dan kolaborasi. untuk mengoptimalkan upaya resolusi tersebut, dibutuhkan sebuah kejelasan mekanisme kolaborasi yang dilandasi prinsip co-ownership, co-operation, co-responsibility.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi, C. I., Rinekso, S., Soeryo, A., & Cecep, K. (2017). Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan Model. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(1), 47–59.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). *Perambahan di Taman Nasional Rinjani Semakin Meluas*.
- Borrini, F. G. (2000). *Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning by Doing*. IUCN.
- BTNGR. (2014). *Rencana Pengelolaan Taman Nasional 2014- 2023*.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Radja Grafindo Persada.
- Chairil, I. A., Aji, I. M. L., Anwar, H., Waru, T., & Febryano, I. G. (2020). The implementation of conservation village model program in mount Rinjani national park (A regulation perspective). *Ecology, Environment and Conservation*, 26(3), 1100–1109.
- Chambers, R. (1992). *Rural Appraisal, Rapid, Relaxed and Participatory*. Inst.Dev.Studies, Univ.of Sussex.
- Ernan, R. (2005). *Sumberdaya Bersama, Kerangka Teori Dasar: Isu dan Tantangan Masa Depan di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Forest Watch Indonesia. (2014). *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2009 – 2013* (Issue Id). Forest Watch Indonesia.
- Gamin, F. L. (2017). Penyelesaian Sengketa Ruang Hidup Masyarakat Sunda Wiwitan Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(1), 1–8.



- Hakim, N., Murtalaksono, K., & Rusdiana, O. (2016). Land use Conflict in Gunung halimun Salak National Park Lebak District. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2007, 128–138.
- Herawati, T., Widjayanto, N., Saharuddin, & Eriyatno. (2010). Analisis Respon Pemangku Kepentingan Di Daerah Terhadap Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Pusat Penelitian Sosek Dan Kebijakan Kehutanan. Bogor*, Vol. 7(1), 13–25.
- Ichsan, A. C., Aji, I. M. L., Webliana, K., & Sari, D. P. (2019). The Analysis of Institutional Performance of the Village Conservation Model in Gunung Rinjani National Park. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 270(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/270/1/012019>
- Kadir W, A., M, N., & Purwanti, R. (2013). Konflik Pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan Dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3), 186–198. <https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.3.186-198>
- Mitchell, B., Setiawan, B. D. H. R. (2003). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gajdah Mada University Press.
- Mulyana D. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pasya, G. S. M. (2011). *Analisa Gaya Bersengketa-AGATA. Panduan Ringkas untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Samdhana Institute.
- Raja, S. P. (2012). *Indonesia Climate Adaptation Tool for Coastal Habitats*. USAID IMACS.
- Sahabu, B., Kolopaking, L. M., Sains, D., Masyarakat, P., Manusia, F. E., & Bogor, I. P. (2013). *Studi Kasus Di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat*.
- Sevilla, C. G. et al. (1993). *Pengantar Metode Penelitian* (A. T. dan A. Syah (ed.)). UI Press.
- Suporahardjo. (2005). *Manajemen Kolaborasi*. Pustaka latin.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan anajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Salemba Humanika.
- Wiyono, et al. (2006). *Kehutanan Multipihak Langkah Menuju Perubahan*. Center For International Forestry Research.
- Wollenberg, E., David, E., Louise, B., & Jeff, B. (2005). *Pembelajaran Sosial dalam Pengelolaan Hutan Komunitas* (Issue Id). Pustaka Latin.
- Zuhud, E. A. M. (2011). *Pengembangan Desa Konservasi Hutan Keanekaragaman Hayati Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Dan Obat Keluarga Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Krisis Baru Ekonomi Dunia Di Era Globalisasi* (JOrasi Ilm). Institut Pertanian Bogor.
- Zulfikar, A. M., & Nasdian, F. T. (2018). Analisis Konflik Pengelolaan Sumberdaya Alam Di. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 2(5), 639–652.